

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Quran Karim dan Terjemahan Isinya. UII PRESS, Yogyakarta. 2010.

HRT. Sri Soemantri M, *Otonomi Daerah*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 2014.

H. Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. 2001.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah)*. PT. Alumni. Bandung. 2004.

Lilli Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2007.

Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*. Oxford University Press, New York. 1960.

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta. Cetakan Pertama, 1993.

Lexi J . Moloeng. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1990.

Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1997.

Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.

Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta. 1988.

Bondan Gunawan, *Apa Itu Demokrasi*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2000.

Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta. 2004.

Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002

Ateng Syarifudin, *Hubungan Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Tarsito, Bandung. 1982.

Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2008.

Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. Rajawali Pers, Jakarta. 2010.

Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. FH UII Press, Yogyakarta. 2010.

Jimly Ashiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta. 2006

Deliar Noer. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. CV Rajawali, Jakarta. 1983.

Amirmachmud. *Demokrasi, Undang-Undang dan Peran Rakyat*. Dimuat dalam PRISMA No. 8. LP3ES, Jakarta. 1984

Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia, Jakarta. 1982

Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1996.

Miriam Budiardjo, *Masalah Accountability dalam Ilmu Politik*. Pidato Pengukuhan Gelar Doktor Kehormatan dalam Ilmu Politik. Universitas Indonesia. 13 Desember 1997.

David McClellan, *The Thought of Karl Marx*. The MacMillan Press, London. 1980.

David Held. *Demokrasi dan Tatahan Global dari Negara Modrn Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta. 2004

David Heldz. *Model of Democracy*. Diterjemahkan oleh Abdul Haris. Akbar Tandjung Institue, Jakarta. 2007.

Ahmad Syafii Maarif, *Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Dalam Bosco Carcallo dan Dasrizal (Editor), *Aspirasi Ummat Islam Indonesia*. Leppenas, Jakarta. 1993

Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Hakikat Politik Islam*. PLP2M, Yogyakarta. 1987.

Ahmad Hakim dan M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*. UII Press. Yogyakarta. 2005.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas, Jakarta. 2000.

Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*. Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi. 1965.

- Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*. Panji Masyarakat, Jakarta. 1960. (cetakan I)
- Moh. Natsir, *Kapita Selekta*. Bulan Bintang, Jakarta. 1973
- Adnan Buyung Nasution dkk., *Federalisme Untuk Indonesia*. Kompas, Jakarta. 2000.
- Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*. Bina Cipta, Bandung. 1974.
- Abu Daud Husroh, *Ilmu Negara*. Bumi Aksara, Jakarta. 1990.
- Abdurrahman (Editor), *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Media Sarana Press, Jakarta. 1987.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. 2001.
- Syamsuddin Haris (Editor), *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI*. LIPI Press, Jakarta. 2004.
- RDH Koesoemahatmadja, *Pengantar Kearifan Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung. 1979.
- Abdul Latif. *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Total Media, Jakarta. 2009.
- S.H. Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2003.
- M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006.

Haw. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Rajawali Press, Jakarta. 1996.

Deddy S. Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2002.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. Fifth Edition, ST. Paul Minn, West Publishing Co. USA. 1979.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.

Jurnal dan Makalah Hukum:

Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Hukum di Negara Republik Indonesia*. Diktat Pelengkap Bahan Kuliah. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 1989.

Indira Samego, *Masalah Good Governance di dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Jurnal Demokrasi dan Ham, Vol. 2, No. 2. Juni-September. 2002.

Benyamin Hoessein, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II*. Disertasi, Pasca Sarjana UI. 1993.

Data Elektronik:

<http://www.phrases.org.uk/meanings/absolute-power-corrupts-absolutely.html>

[Diakses pada 12 November 2015 pukul 00.26 WIB]

<http://www.negarahukum.com/hukum/pemisahan-kekuasaan-vs-pembagian-kekuasaan.html> [Diakses pada 12 November 2015 pukul 00.26 WIB]

<http://king-andrias.blogspot.com/2012/04/materi-kuliah-teori-perwakilan.html>

[Diakses pada 19 November 2015 Pukul 04.25 WIB]

<http://NU.or.id/kolom/idealisme-H-Mahbub-Djunaidi.html> [Diakses pada 30 November 2015 Pukul 02.29 WIB]

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0411/19/opi4.htm> [Diakses: Kamis, 05 Februari 2016 Pukul 01.19 WIB]

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Kumpulan Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara (Pemerintah) Pusat dan (Pemerintah) Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Pemerintah Daerah.
- Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Putusan Peradilan :

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015